

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA TERLANTAR DI KOTA MAGELANG MELALUI PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)

Oktaviana Ratnawati

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116
(0293) 364113/(0293) 362438/Universitas Tidar

e-mail: oktav4213@gmail.com

ABSTRACT

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan kebijakan, upaya maupun tindakan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan yaitu adanya Lanjut Usia Terlantar, dimana lansia terlantar merupakan salah satu diantara golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Mengingat kondisi lansia di Kota Magelang rata-rata sudah *bed rest*, tidak berpenghasilan dan sudah tidak produktif lagi sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bergantung kepada keluarga maupun sanak saudara. Dinas Sosial Kota Magelang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial memiliki peran penting dalam menangani masalah kemiskinan maupun ketelantaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Magelang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (2016) yang terdiri dari peran dan keterampilan memfasilitasi, peran dan keterampilan mendidik, peran dan keterampilan representasi dan peran dan keterampilan teknis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Magelang dilakukan dengan mengakomodir capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi lanjut usia terlantar melalui layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).

Keywords: Kesejahteraan, Peran, Dinas Sosial, ASLUT

1. PENDAHULUAN

Tercapainya kesejahteraan dalam bidang sosial yang merata bagi seluruh rakyat pada dasarnya berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Kesejahteraan pada dasarnya tertuang pada UU No. 11 Tahun 2009 [1], bahwa kesejahteraan sosial ialah keadaan dimana warga negara tercukupi kebutuhan material, spiritual, serta sosial sehingga dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan pada dasarnya tidak semata-mata mengenai material dan spiritual. Akan tetapi, seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok baik material maupun spiritualnya. Permasalahan tingkat ekonomi dalam hal ini berpengaruh pada kesejahteraan. Dimana yang menjadi patokan kesejahteraan terletak pada tingkat ekonomi suatu masyarakat. Permasalahan pada tingkat ekonomi hingga detik ini tidak akan ada

habisnya untuk dikaji ialah masalah kemiskinan.

Berbagai kebijakan telah pemerintah lakukan. Akan tetapi tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi pemerintah diharapkan lebih berpikir keras lagi dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan. Hingga saat ini, Indonesia masih bergelut dengan masalah kemiskinan yang diantaranya yaitu Lanjut Usia Terlantar.

Lanjut usia terlantar ialah lansia dimana dalam keadaan terlantar, sudah tidak potensial, tidak mempunyai dana pensiun, tidak memiliki asset maupun tabungan yang mencukupi yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya [2]. Kemiskinan yang di dalamnya termasuk Lanjut Usia Terlantar merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian yang lebih. Todaro, Michael P dan Stephen C Smith (2015) [3] permasalahan kemiskinan yang luas dan angka kemiskinan yang tinggi sebagai sumber dan inti dari seluruh permasalahan pembangunan.

Terdapat beberapa faktor yang memicu masalah ini salah satu diantaranya ialah terbatasnya akses lapangan pekerjaan di desa yang menyebabkan sebagian besar penduduk desa melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan. Akibatnya, terjadi kepadatan penduduk yang menimbulkan beberapa area kumuh di berbagai sudut kota. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa banyak keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya

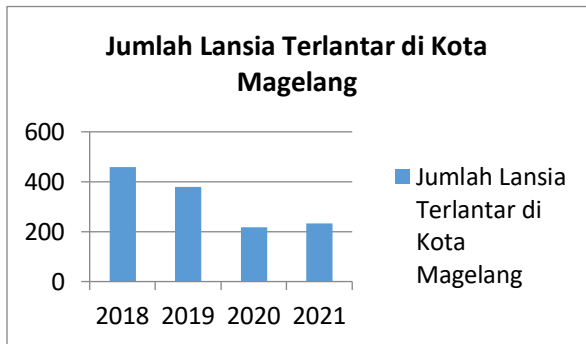
sehingga mengakibatkan ketelantaran terhadap lanjut usia. Hal ini senada dengan pernyataan Setyo Sumarno dan Achmadi Jayaputra (2011) [4] bahwa pada waktu yang sama tuntutan keperluan maupun aspek kehidupan secara luas mengakibatkan pergerakan pola hubungan keluarga serta masyarakat sehingga nantinya cenderung meminimalisir kepada lansia sehingga mengakibatkan ketelantaran bagi lansia. Faktor yang lain yakni: menurunnya nilai-nilai kekeluargaan, kesibukan anak-anak dari lansia sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus, pihak keluarga yang tidak mampu untuk merawat lanjut usia sehingga hidup tanpa keluarga atau sebatang kara [5].

Masalah kemiskinan seperti ini tidak hanya terdapat di perkotaan besar, melainkan daerah kecil seperti Kota Magelang pun masih banyak dijumpai. Pada 20 Agustus 2021, *update* terakhir dari BPS Kota Magelang mencatat bahwa di tahun 2021, total fakir miskin di Kota Magelang sebesar 5.477 jiwa sedangkan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.219 jiwa. Tentu dari tahun ke tahun angka berbeda baik itu mengalami penurunan maupun peningkatan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil pokok bahasan mengenai PMKS yang didalamnya terkait dengan lansia terlantar. Dimana lansia terlantar termasuk masalah kemiskinan yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah segera.

Berikut peneliti sajikan jumlah lansia terlantar yang ada di Kota Magelang:

Gambar 1. Jumlah Lansia Terlantar di Kota Magelang



Sumber: *datago.magelangkota.go.id*

Data diatas diambil melalui *website* DataGo Magelang Kota, yang memperlihatkan bahwa di Kota Magelang terdapat lanjut usia terlantar dengan jumlah terbesar yaitu di tahun 2018 dengan total sebanyak 459 jiwa dan jumlah sedikit di tahun 2020 yaitu sebesar 217 jiwa. Melihat angka yang tentu tidak sedikit tersebut dalam hal ini upaya pemerintah terkait harus melakukan penanganan lanjut terhadap lanjut usia terlantar dengan segera. Mengingat dengan jumlah lansia terlantar yang tidak sedikit. Dimana upaya pemerintah tersebut pada dasarnya merupakan peran pemerintah dalam hal ini peran Dinas Sosial Kota Magelang.

Penanganan masalah lanjut usia terlantar dalam hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2020 [5], mengenai Asistensi Rehabilitasi Sosial dimana rehabilitasi sosial merupakan bentuk layanan dengan pendekatan secara kekeluargaan maupun melalui berbagai

kegiatan yang mendukung. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “ Bagaimana peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Magelang ?” sedangkan tujuan penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kota Magelang terkhusus Dinas Sosial agar dapat melaksanakan peran dengan sebagaimana mestinya terhadap kebijakan, upaya maupun tindakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia terlantar secara baik dan layak. Sehingga untuk menganalisis fenomena maupun permasalahan yang ada di lapangan, penelitian ini menggunakan teori peran dari Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016) yang memuat empat indikator yaitu peran dan keterampilan memfasilitasi, peran dan keterampilan mendidik, peran dan keterampilan representasi, dan peran dan keterampilan teknis.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber antara lain: Penyuluh Sosial Muda Dinas Sosial Kota Magelang, Pendamping Program Layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Pekerja Sosial Ahli Muda selaku Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Tuna

Sosial, Ka. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Masyarakat peserta Program Layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal-jurnal, *website*, dokumen, foto dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dan teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif. Berdasarkan Miles, Huberman dan Saldana 2014:14 [6], teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi.

Setelah semua data terkumpul, menggunakan metode penelitian deskriptif yang pada dasarnya berfokus pada pemecahan masalah, analisis serta klasifikasi, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara mengolah data yang didapatkan di lapangan yang disusun secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Magelang. Dengan berbagai literatur yang relevan dengan studi yang akan dilakukan secara rinci dan pada akhirnya dapat mempelajarinya secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Magelang yaitu melalui Layanan Rehabsos Dasar bagi lansia terlantar. Berdasarkan Pasal 26 Permensos No. 9 Tahun 2018 [7] mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota telah disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah kabupaten/kota salah satunya yaitu Rehabilitasi Sosial (rehabsos) Dasar lansia terlantar diluar panti sosial. Dinas Sosial Kota Magelang dalam hal ini mengakomodir capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terhadap lansia terlantar melalui layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Melihat kesesuaian antara yang didapatkan peneliti dilapangan dengan konsep dan praktik maka peneliti menganalisis berdasarkan teori peran dari Jim Iff dan Frank Tesoriero:2016 [8] yang mana konsep idealnya adalah teori ini mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kaitannya dengan peran pemerintah maka peran Dinas Sosial Kota Magelang dalam peningkatan kesejahteraan lansia terlantar sebagai berikut:

Peran dan Keterampilan Memfasilitasi

1. Semangat sosial

Dinas Sosial Kota Magelang melakukan komunikasi, informasi, motivasi maupun edukasi kepada pendamping

layanan ASLUT maupun kepada keluarga serta individu yang terlantar.

2. Mediasi dan negosiasi

Terhadap pendamping yaitu setiap bulan dilakukan evaluasi kepada para pendamping layanan ASLUT untuk melihat *progress* layanan tersebut terhadap lanjut usia terlantar, apakah stabil atau mengalami peningkatan. Tiap akhir tahun diadakan peningkatan kapasitas dari sisi *teamwork* diberikan penguatan agar para pendamping kompak di lapangan.

3. Dukungan

Dukungan diberikan dengan memberikan motivasi yaitu biarpun sudah usia lanjut tetapi harus tetap sehat. Dinas Sosial memperhatikan lanjut usia melalui pendampingan dan pemberian bantuan. Selain itu, bentuk dukungan yang diberikan pula bantuan sosial.

4. Membangun konsensus

Dalam hal ini membangun konsensus dilakukan melalui pendekatan awal terkait pemahaman mengenai program ASLUT serta penerimaan dari keluarga. Disamping itu, membangun konsensus dilakukan melalui pendampingan di lapangan dan kesepakatan dengan keluarga terkait program layanan ASLUT ini.

5. Fasilitasi kelompok

Melalui program bagi lanjut usia terlantar yaitu layanan ASLUT. Dinas Sosial melakukan penguatan terhadap pendamping ASLUT. Di tahun 2021 Dinas Sosial telah melakukan pelatihan pendampingan sebanyak 34 pendamping dari 17 kelurahan. Disamping itu, fasilitasi kelompok juga diwujudkan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lanjut usia melalui layanan *home care*.

6. Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya

Pada dasarnya lanjut usia penerima manfaat layanan ASLUT di Kota Magelang memang kebanyakan yaitu lanjutusia yang sudah tidak produktif. Rata-rata *bed rest* atau sakit sehingga sudah tidak potensial. Berkaitan dengan sumber daya hanya sekedar melakukan aktivitas bagi lanjut usia seperti senam sesuai dengan kemampuan sehingga tidak hanya diam/pasif/tiduran.

7. Mengorganisasi

Terkait mengorganisasi keterampilan yaitu sebatas keterampilan untuk diri sendiri, kemampuan secara fisik. Misalkan yang awalnya tidak bisa apa-apa setelah di dampingi kemampuan fisiknya meningkat contoh kecilnya lanjut usia dapat memakai baju sendiri dan lebih mandiri.

8. Komunikasi pribadi

Cangara (2015: 38) [9] mengartikan bahwa komunikasi merupakan proses dimana pembicara menyampaikan pesan dalam situasi tatap muka di depan khalayak umum. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi program layanan ASLUT kepada 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang, kemudian petugas pendamping layanan ASLUT juga melakukan koordinasi dengan kelurahan setempat. Selain itu, komunikasi pribadi dengan penerima manfaat yakni cara menyampaikan informasi harus pelan-pelan didekatkan telinga lansia atau melalui keluarga untuk menyampaikan informasi tersebut.

Peran dan Keterampilan Mendidik

1. Peningkatan kesadaran
 - a. Melalui Penguatan keluarga : Memberikan pengetahuan kepada keluarga akan pentingnya merawat lanjut usia di dalam keluarga dengan cara menjaga kebersihannya, melatih kemampuan fisik dari lansia sehingga tidak hanya pasif dan tiduran saja sehingga meskipun sudah usia lanjut akan tetapi tetap sehat.
 - b. Melihat faktor-faktor penghambat lanjut usia : Yang mana lanjut usia telah

mengalami penghambatan di dalam keluarga. Contoh: sisi kesehatan lansia, keluarga diingatkan dari tempat tidur, tempat tinggal untuk menjaga pola kebersihan.

- c. Akses layanan : Dengan cara memberikan edukasi ke pihak keluarga.

2. Memberikan informasi

Dalam memberikan informasi, yakni dilakukan melalui pendamping program layanan ASLUT baik secara individual maupun isyarat dan disampaikan secara langsung atau melalui keluarga sedangkan pemberian informasi oleh Dinas Sosial dilakukan melalui koordinasi setiap 3 bulan sekali untuk memberikan informasi yaitu sosialisasi terkait program di Dinas Sosial apa saja beserta permintaan data.

3. Konfrontasi

Konfrontasi dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi internal (pendamping) dan dari sisi eksternal yaitu pihak keluarga lanjut usia terlantar. Dari internal, yaitu kurangnya pemahaman mengenai ASLUT itu sendiri. Adapun dari pihak keluarga, yakni penerimaan dari keluarga itu sendiri.

4. Pelatihan

Pelatihan dalam hal ini sekedar memberikan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan spiritual serta perawatan sosial. Karena pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kemandirian lansia sehingga biarpun usia sudah lanjut tetapi semangat hidup masih ada dan masih sehat.

Peran dan Keterampilan Representasi

1. Memperoleh berbagai sumber daya
 Dalam memperoleh berbagai sumber daya pada dasarnya penerima manfaat rata-rata masih ada keluarga atau masyarakat yang mengurus tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di Kota Magelang ada yang terlantar tapi angkanya tidak banyak.
2. Advokasi
 Terkait advokasi yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa program ASLUT merupakan bentuk layanan yang berkesinambungan dengan tujuan mencegah ketelantaran yang ada di masyarakat. Terkait dengan bantuan sosial, apabila terdapat masyarakat yang sesuai kriteria layak mendapatkan bantuan sosial akan tetapi belum masuk ke dalam data DTKS dapat secara mandiri.
3. Menggunakan media
 Penggunaan media terkait program layanan ASLUT dan petugas pendamping ASLUT salah satunya ada

di *website* Dinas Sosial Kota Magelang dan melalui WhatsApp (WA) untuk koordinasi dengan kelurahan. Untuk penerima bantuan sosial ada pada aplikasi Sistem Kesejahteraan *Sosial-Next Generation* (SIKS-NG) yang mana merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah.

4. Humas dan presentasi publik
 Humas dan presentasi publik dalam hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan adanya program layanan ASLUT kepada pihak-pihak terkait maupun masyarakat. Hal ini dilakukan pada saat pendampingan di lapangan.
5. Jaringan kerja (*networking*)
 Jaringan kerja diantaranya yaitu melalui petugas pendamping layanan ASLUT dan koordinasi dengan 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang. Dinas Sosial mempunyai beberapa pilar diantaranya yaitu PSM, TKSK, dan TAGANA.
6. Berbagi pengetahuan dan pengalaman
 Dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman dilakukan melalui komunikasi internal dan koordinasi kepada petugas pendamping ASLUT. Adapun untuk pegawai Dinas Sosia saling memberitahu dan saling membantu secara internal.

Peran dan Keterampilan Teknis

1. Penelitian

Dalam melakukan penelitian yaitu dengan terjun langsung ke lapangan. Terkadang data di awal tahun lansia masih hidup, di tengah tahun sudah tidak ada. Padahal hal tersebut akan dijadikan sasaran untuk tahun berikutnya. Karena pada dasarnya belum terdeteksi apabila belum dilakukan pemadanan data di lapangan. Pengumpulan data mengenai kondisi lansia yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan (*by name by address*).

2. Menggunakan komputer

Dalam penggunaan komputer, pegawai Dinas Sosial sudah cukup baik. Di sisi lain untuk mendukung keterampilan baik ASN maupun pendamping dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) secara internal misal ada Aplikasi Data itu dikenalkan secara internal. Paling tidak saling belajar sesama pegawai, apabila tidak paham dengan IT di Dinas Sosial ada ahlinya sehingga saling membantu dan memberitahu satu sama lain.

3. Presentasi verbal dan tertulis

Presentasi dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, yang disampaikan baik secara verbal maupun tertulis. Melalui bimbingan misalnya mengajari sholat, tayamum karena usia lanjut kebanyakan sudah tidak mampu untuk melakukan wudhu menggunakan air. Melakukan

sosialisasi kepada kelurahan terkait program apa saja yang ada di Dinas Sosial. Menyampaikan kepada masyarakat melalui kelurahan dan RT/RW bahwa adanya bantuan sosial.

4. Manajemen

Manajemen terkait penerima manfaat di sesuaikan dengan yang telah disebutkan dalam Permensos No. 8 Tahun 2012 [10] tentang jenis-jenis PMKS, dengan alur: Pemadanan Data, Pengolahan Data dan Penetapan Penerima Manfaat. Adapun di kelurahan terdapat Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan penerima manfaat agar tepat sasaran dan tidak sembaranga mengirimkan data.

5. Pengaturan keuangan

Untuk anggaran yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dari program ATENSI juga diberikan, kemudian bantuan permakanan dari Kemensos.

4. SIMPULAN

Peran pada Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di wilayah Kota Magelang sama halnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Yang mana upaya tersebut diwujudkan melalui layanan Rehabilitasi Dasar bagi lanjut usia terlantar dalam rangka mencukupi kebutuhan

dasar. Dinas Sosial Kota Magelang mengakomodir capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial bertujuan lansia terlantar diwujudkan dengan layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sesuai kebutuhan maupun kemampuan layanan dasar yang diberikan. Pada dasarnya program layanan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang ada di wilayah Kota Magelang telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat melalui hasil dari penelitian serta pembahasan menggunakan Teori Peran dari Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016) antara lain:

- 1) Peran dan Keterampilan Memfasilitasi, yang meliputi: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan sosial dan pengasuhan, pelaksanaan bantuan bertujuan lanjut usia (BANTU LU), pemberian permakanan bagi lansia, perbekalan kesehatan serta akses layanan kesehatan dasar.
- 2) Peran dan Keterampilan Mendidik yang, yang meliputi: bimbingan spiritual, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
- 3) Peran dan Keterampilan Representasi, yang meliputi: jaringan kerja (Networking), 3 pilar yaitu PSM, TKSK dan TAGANA, kerja sama dengan Puskesmas maupun rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Magelang, Presentasi dan informasi Publik dapat

diakses melalui laman <http://dinsos.magelangkota.go.id/> dan <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/public/dashboard>.

- 4) Peran dan Keterampilan Teknis, yang meliputi: teknis penerima layanan Atensi yang berasal dari DTKS, tahapan pengelolaan DTKS, pengaturan keuangan (pendanaan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota serta pendanaan program layanan ASLUT dan kemampuan menggunakan komputer.

Saran terkait permasalahan dan pembahasan adalah pada Dinas Sosial belum adanya *shelter*, sehingga ketika terdapat lanjut usia terlantar yang tidak memiliki rumah (papan) untuk saat ini belum bisa menampung. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dinas Sosial ialah dengan mengupayakan adanya papan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak lanjut usia terlantar sebab untuk saat ini Dinas Sosial Kota Magelang dalam memenuhi kebutuhan lansia sebatas sandang dan pangan dan hanya sekedar memberi arahan dan mengantar/rujukan ke panti jompo se Jawa Tengah khususnya ataupun dengan melacak melalui Dinas Sosial se Indonesia melalui KSK atau TKSK. Akan tetapi untuk menitipkan di panti jompo jarang karena berbayar. Saran untuk kedepan

agar Dinas Sosial Kota Magelang dalam pemenuhan hak-hak lanjut usia terlantar dalam hal ini papan untuk mengupayakan adanya *shelter* dapat terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- [2] Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.
- [3] Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith (2015), *Economic Development*. 12th Edition. Pearson Ltd. New York.
- [4] Sumarno, S. dkk (2011). *Evaluasi Program Jaminan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta: P3KS Press.
- [5] Sri Sulastri dan Suhadi Humaedi. *Pelayanan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti*. Prosiding KS: Riset & PKM. Volume: 4, Nomor: 1, Hal: 1-140. ISSN: 2442-4480.
- [6] Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- [7] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- [8] Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
- [9] Jim Iffe & Frank Tesoriero. 2016. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Cetakan III. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- [10] Cangara, Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan Kedua. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- [11] Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.